



RENJA 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TAHUN 2021



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
34. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2022 disusun berpedoman pada :

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Ngawi membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Koperasi dan usaha Mikro kabupaten Ngawi menyusun Dokumen Renja 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro kabupaten Ngawi menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Ngawi dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

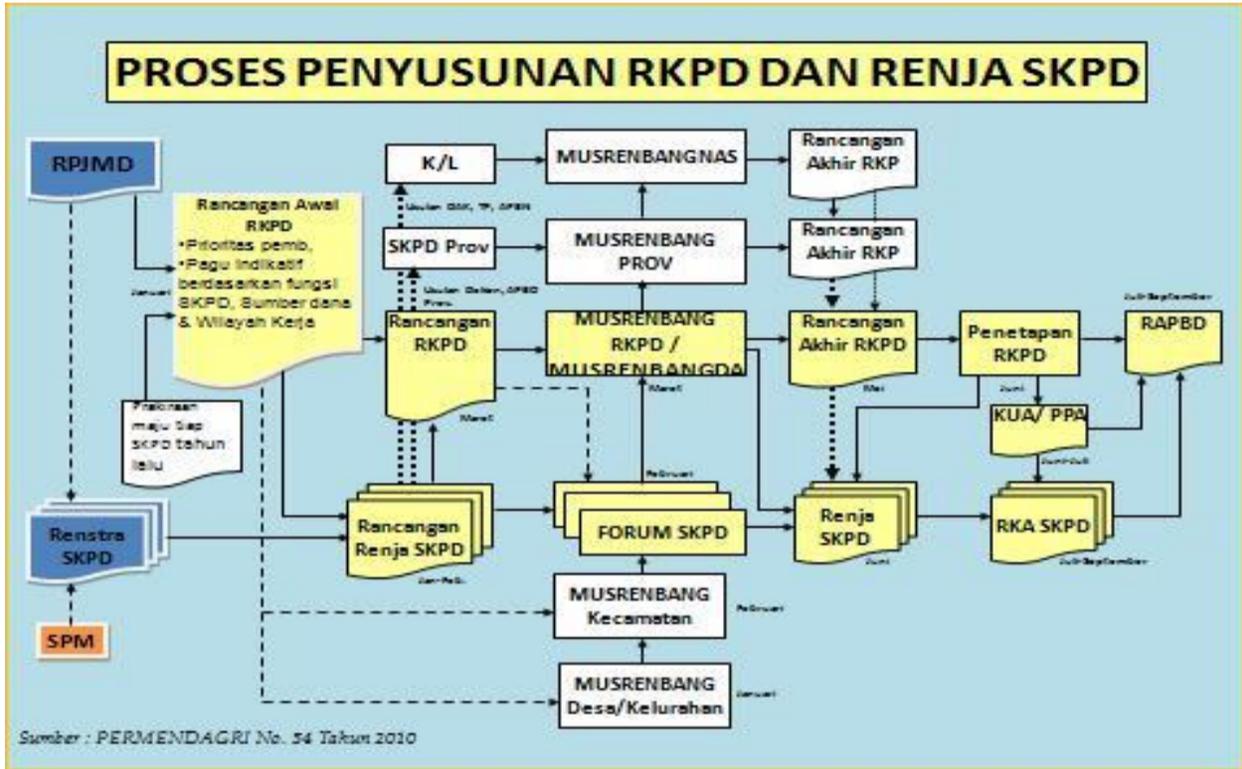
Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Penyusunan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan:

1. Arah Pembangunan yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 tahapan RPJMD ke-4 (empat) yaitu “Pengembangan Teknologi Guna Mewujudkan Kabupaten Ngawi Yang Sejahtera”;
2. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2021 Triwulan I dan Tahun 2020 Triwulan IV;
3. Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
4. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
5. Isu-isu strategis dan permasalahan di Kabupaten Ngawi yang berkembang saat ini dan prediksi pada masa mendatang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi itulah diperlukan suatu dokumen rencana kerja yang menguraikan program dan kegiatan tahunan.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2021 dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Kelima pendekatan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk satu siklus perencanaan yang utuh (Gambar 1).



Gambar 1. Alur Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi

Berdasarkan Bagan Alur tersebut penyusunan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Selain itu Proses penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi merupakan dokumen yang tidak berdiri sendiri melainkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mereview Rensta, Penyusunan Rancangan Renja, dan Penetapan Renja. Ketiga tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk menghasilkan dokumen penganggaran yaitu RKA/DPA dan dituangkan dalam dokumen APBD Kabupaten Ngawi.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2022 ini disusun dengan berdasarkan pada peraturan perundangan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- e. Permendagri nomor 86 tahun 2018 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun anggaran 2020
- j. Peraturan Bupati Ngawi No 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan dan menjadi acuan bagi konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun, tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2022;
4. Meningkatkan Pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberian perizinan, sosialisasi dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan di bidang koperasi dan Usaha Mikro.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGAWI TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi.

Sebagai dokumen perencanaan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Penyusunan Renja-SKPD dilakukan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Untuk itu dalam proses penyusunan Renja-SKPD tidak berdiri sendiri melainkan perlu dilakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya dan review capaian Rencana Strategi (Rensta) SKPD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program dan kegiatannya maupun dalam pencapaian target kinerja yang bersifat outcome dan output.

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2022 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang di hadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- b. Tujuan yang akan dikehendaki
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
- d. Kebijakan-kebijakan dalam melaksanakannya

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2022 juga memperhatikan Hasil Evaluasi Capaian kinerja Tahun 2020 sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun 2020 sebagai berikut:

Evaluasi Terhadap Renja Perangkat Daerah Kabupaten
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN NGAWI
Triwulan IV Periode Pelaksanaan Tahun 2020

| No | Kode | Usuran/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra OPD Kabupaten pada Tahun 2016 s/d 2021 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Kabupaten sampai dengan Renja Tahun (2017 s/d 2019) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi (2020) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020(%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket | |
|----|------|---|---|---|---|---|---------------------------------|----|-----|----|--|---|--|--|--|-----|----|
| | | | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8+9+10+11 | 13=12/7x100% | 14 = 6+12 | 15 = 14/5x100 | 16 | 17 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | 0 | 0 | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Program pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 01 | 000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening listrik yang dibayar | 192 | Rekening | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah rekening air yang dibayar | 108 | Rekening | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah rekening telpon dan internet yang dibayar | 192 | Rekening | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 01 | 000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar | 13 | Unit | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 01 | 000 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pembayaran honor | 1,483 | Kali | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah pembayaran lembur | 1,334 | Kali | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah materai yang terbeli | 9 | Lembar | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 01 | 000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan ATK | 600 | % | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 01 | 000 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang yang dicetak | 46,8 | Lembar | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah barang yang digandakan | 64,3 | Lembar | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 01 | 000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi | 600 | % | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 01 | 009 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah surat kabar yang disediakan | 300 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah publikasi ke media cetak dan elektronik | 2 | kali | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 01 | 010 Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 5,052 | Kotak | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 01 | 011 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 222 | Kali | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 01 | 012 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 407 | Kali | | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 02 | 000 4 Pengadaan Meubelair | Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan | 82 | Unit | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 02 | 000 6 Pengadaan Peralatan Kerja | Jumlah peralatan kerja yang dibeli/diadakan | 36 | Unit | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 02 | 010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 1,464 | M2 | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 02 | 011 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | 72 | Kali | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 02 | 012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor | 426 | Kali | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 02 | 016 Pemeliharaan Peralatan Kerja | Jumlah pemeliharaan peralatan kerja | 626 | Kali | | | | | | | | | | |
| | 0 | 00 | 02 | 017 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor | Jumlah alat kebersihan yang dibeli | 32 | Buah | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah bahan kebersihan yang dibeli | 27 | Buah | | | | | | | | | | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|--|--|--------------|
| 3 | 0 | 0 | 3 | | Program peningkatan disiplin aparatur | | |
| | 0 | 00 | 03 | 000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan | 251 Potong |
| | 0 | 00 | 03 | 000 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah pakaian batik yang dibeli/diadakan | 232 Potong |
| 4 | 0 | 0 | 6 | | Program peningkatan capaian kinerja dan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan | | |
| | 0 | 00 | 06 | 000 | Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Kinerja OPD/SKPD | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran OPD yang disusun tepat waktu | 12 Dokumen |
| | | | | | | Jumlah Laporan kinerja OPD yang disusun tepat waktu | 15 Dokumen |
| | 0 | 00 | 06 | 000 | Penyusunan Laporan Keuangan OPD/SKPD | Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun tepat waktu | 12 Dokumen |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN | | |
| 2 | 11 | | | | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 5 | 2 | 11 | 15 | | Program Peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan koperasi | | |
| | 2 | 11 | 15 | 000 | Pembinaan kelembagaan koperasi | Jumlah laporan hasil pembinaan koperasi yang ditindaklanjuti | 18 Dokumen |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil pengawasan koperasi yang | 18 Dokumen |
| | | | | | | Jumlah peserta pelatihan manajemen pengelolaan | 180 Orang |
| | 2 | 11 | 15 | 000 | Pengembangan usaha koperasi | Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha koperasi | 315 Orang |
| | | | | | | Jumlah event pameran yang diikuti | 3 Kali |
| | 2 | 11 | 15 | 000 | Koordinasi kebijakan pembangunan koperasi | Jumlah hasil koordinasi kebijakan pembangunan | 77 Kali |
| | 2 | 11 | 15 | 000 | Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM | Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas koperasi | 600 Orang |
| 6 | 2 | 11 | 16 | | Program Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Usaha Mikro | | |
| | 2 | 11 | 16 | 000 | Fasilitasi akses pembiayaan koperasi dan usaha mikro | Jumlah peserta yang menindaklanjuti hasil sosialisasi | 450 Orang |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil koordinasi fasilitasi akses pembiayaan | 30 Dokumen |
| | | | | | | Jumlah dokumen kerjasama akses pembiayaan Koperasi dan | 18 Dokumen |
| | 2 | 11 | 16 | 000 | Pengembangan sumber daya KSP/USP koperasi | Jumlah peserta pelatihan pengembangan KSP/USP | 300 Orang |
| | | | | | | Jumlah laporan hasil koordinasi pengembangan sumber daya | 9 Dokumen |
| | 2 | 11 | 16 | 000 | Pengendalian kegiatan usaha KSP/USP Koperasi | Jumlah koperasi simpan pinjam yang naik klasifikasi kategori: | 855 Koperasi |
| | | | | | | Jumlah peserta bimbingan teknis SPI yang melaksanakan | 480 Orang |
| | | | | | | Jumlah hasil laporan koordinasi pengendalian kegiatan usaha | 9 Dokumen |

| | | | | | | |
|---|---|----|----|---|---|-----------------|
| 7 | 2 | 11 | 17 | Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi usaha mikro | | |
| | 2 | 11 | 17 | 000 Pengembangan diversifikasi produk non makanan | Persentase peserta pelatihan diversifikasi produk non | 90 % |
| | | | | | Jumlah hasil koordinasi pengembangan diversifikasi | 48 Kali |
| | 2 | 11 | 17 | 000 Fasilitasi legalitas dan pengembangan produk usaha mikro | Jumlah produk usaha mikro yang mendapat legalitas sesuai | 780 Usaha Mikro |
| | | | | | Jumlah laporan hasil koordinasi fasilitasi legalitas produk usaha | 3 Dokumen |
| | 2 | 11 | 17 | 000 Pengembangan teknologi produk usaha mikro | Jumlah peserta bintek pengembangan teknologi | 220 Orang |
| | 2 | 11 | 17 | 000 Pengembangan diversifikasi produk makanan | Persentase peserta pelatihan diversifikasi produk makanan | 60 % |
| | | | | | Jumlah hasil koordinasi pengembangan diversifikasi | 162 Kali |
| | | | | | | |
| 8 | 2 | 11 | 18 | Program Penciptaan iklim usaha, usaha mikro yang kondusif | | |
| | 2 | 11 | 18 | 000 Peningkatan kualitas SDM usaha mikro | Jumlah peserta pembinaan usaha mikro yang mendapatkan | 130 Orang |
| | | | | | Jumlah dokumen pemetaan usaha mikro yang up to date | 3 Dokumen |
| | 2 | 11 | 18 | 000 Promosi produk usaha mikro | Jumlah usaha mikro yang jejaring pasarnya ditindaklanjuti | 60 Usaha Mikro |
| | 2 | 11 | 18 | 000 Fasilitasi pengembangan usaha mikro | Jumlah peserta pelatihan wirasusaha baru yang | 200 Orang |
| | | | | | Jumlah dokumen kerjasama Usaha Mikro dengan | 3 Dokumen |
| | | | | | | |
| 9 | 2 | 11 | 19 | Program Penempatan transmigrasi | | |
| | 2 | 11 | 19 | 000 Peningkatan kerja sama antar wilayah pengembangan kawasan transmigrasi | Jumlah laporan hasil penjajagan dan KSAD yang ditindaklanjuti | 3 Dokumen |
| | | | | | Jumlah dokumen laporan animo minat masyarakat terhadap | 30 Dokumen |
| | 2 | 11 | 19 | 000 Fasilitasi penempatan transmigrasi | Jumlah calon transmigran yang difasilitasi | 33 KK |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja capaian program(Renstra OPD)tahun 2021 | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sd tahun 2021 | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Kabupaten Tahun berjalan yang dievaluasi(2021) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021(%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Ket |
|----|-------|---|---|---|--|--|---------------------------------|----|-----|----|--|---|--|--|--|-----|
| | | | | | | | I | II | III | IV | | | | | | |
| | 0 0 | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Batik Yang Dibeli/Diadakan | 0 | Set | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pakaian Dinas yang Dibeli/Diadakan | 0 | Meter | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah sosialisasi yang diadakan | 0 | Kali | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 0 | % | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Pemenuhan Kebutuhan ATK | 0 | % | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan | 0 | Kotak | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang yang Dicitak | 0 | Buah | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Barang yang Digandakan | 0 | Lembar | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Publikasi Media Cetak dan Elektronik | 0 | Kali | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Surat Kabar yang Disediakan | 0 | Eksemplar | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah yang Dihadiri/Dikuti | 0 | Kali | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang Dihadiri/Dikuti | 0 | Kali | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli/Diadakan | 0 | Unit | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dibeli/Diadakan | 0 | Unit | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 05 Pengadaan Mebel | Jumlah Meubelair yang Diadakan | 0 | Unit | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kantor yang Diadakan | 0 | Unit | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan | 0 | Unit | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 0 1 | 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening Air yang Dibayar | 0 | Rekening | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekening Internet yang Dibayar | 0 | Rekening | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekening Listrik yang Dibayar | 0 | Rekening | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekening Telepon yang Dibayar | 0 | Rekening | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|--|--|---|---------|
| | 0 | 0 | 1 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Alat Kebersihan yang Dibeli | 0 | Jenis |
| | | | | | | Jumlah Bahan Kebersihan yang Dibeli | 0 | Jenis |
| | | | | | | Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan | 0 | Kali |
| | 0 | 0 | 1 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Materai yang Terbeli | 0 | Lembar |
| | | | | | | Jumlah Pembayaran Honor | 0 | Kali |
| | | | | | | Jumlah Pembayaran Lembur | 0 | Kali |
| | 0 | 0 | 1 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayar Pajaknya | 0 | Unit |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara | 0 | Unit |
| | 0 | 0 | 1 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayar Pajaknya | 0 | Unit |
| | | | | | | Jumlah Pemeliharaan Mobil Dinas/Operasional | 0 | Kali |
| | 0 | 0 | 1 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki | 0 | Kali |
| | 0 | 0 | 1 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Pembayaran Jasa Keamanan | 0 | Kali |
| | | | | | | Luasan Gedung Kantor yang Dipelihara | 0 | M2 |
| | 0 | 0 | 1 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara | 0 | Unit |
| | 0 | 0 | 1 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun | 0 | Dokumen |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun | 0 | Dokumen |
| | 0 | 0 | 1 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan OPD yang Disusun | 0 | Dokumen |
| | 0 | 0 | 1 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| | 0 | 0 | 1 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Dokumen dan Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu | 0 | % |
| | 0 | 0 | 1 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Disusun | 0 | Dokumen |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|---|------|--|--|---|----------|
| | 2 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| | 2 | 17 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | |
| 2 | 2 | 17 | 3 | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | |
| | 2 | 17 | 3 | 2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| | 2 | 17 | 3 | 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan | 0 | Koperasi |
| | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 17 | 4 | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | |
| | 2 | 17 | 4 | 2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | 2 | 17 | 4 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 0 | Dokumen |
| | | | | | | Jumlah Peserta Pelatihan | 0 | Orang |
| | | | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi | 0 | Orang |
| | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 17 | 5 | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | |
| | 2 | 17 | 5 | 2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | 2 | 17 | 5 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 0 | Orang |
| | 2 | 17 | 5 | 2.02 | Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten / Kota | | | |
| | 2 | 17 | 5 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemahaman dan pengetahuan tentang kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro | 0 | Orang |
| | | | | | | | | |

| 5 | 2 | 17 | 6 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | |
|---|---|----|---|------|--|---|---|-------------|
| | 2 | 17 | 6 | 2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | 2 | 17 | 6 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Even yang Diikuti | 0 | Kali |
| | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 17 | 7 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | |
| | 2 | 17 | 7 | 2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | |
| | 2 | 17 | 7 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Pemetaan Usaha Mikro | 0 | Dokumen |
| | | | | | | Jumlah Peserta yang Mendapat Nilai 75 | 0 | Orang |
| | 2 | 17 | 7 | 02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Kemitraannya | 0 | Usaha Mikro |
| | 2 | 17 | 7 | 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah peserta sosialisasi pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro yang menindaklanjuti | 0 | usaha mikro |
| | | | | | | Jumlah Usaha Mikro yang Jejaring Pasarnya Ditindaklanjuti | 0 | Usaha Mikro |
| | | | | | | | | |
| 7 | 2 | 17 | 8 | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | |
| | 2 | 17 | 8 | 2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | |
| | 2 | 17 | 8 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah pelatihan yang diadakan | 0 | kali |
| | | | | | | Jumlah Pelatihan diversifikasi non makanan yang diadakan | 0 | kali |
| | | | | | | Jumlah Sosialisasi Pengembangan Teknologi yang diadakan | 0 | kali |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|---|------|---|---|---|------|
| | 3 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| | 3 | 32 | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | |
| 8 | 3 | 32 | 3 | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | |
| | 3 | 32 | 3 | 2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | 3 | 32 | 3 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kerjasama Antar Daerah yang Disepakati | 0 | KSAD |
| | 3 | 32 | 3 | 04 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Calon Transmigran yang Difasilitasi | 0 | KK |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan indikator kinerja kunci dan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi SKPD.

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Ngawi

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Dinkop | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan |
|----|--|----------------------|---|-----------------------|-----------|---------|---------|-------------------|---------|----------|---------|----------|
| | | | | Th 2020 | Th 2021 | Th 2022 | Th 2023 | Th 2020 | Th 2021 | Th 2022 | Th 2023 | Analisis |
| | Persentase koperasi aktif | | | 97.80% | 100% | | | 96,40% | 24.57% | | | |
| | Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (dalam pengawasan khusus, dalam pengawasan, cukup sehat, sehat) | | | 88.91% | 100% | | | 88,07% | 24.52% | | | |
| | Jumlah Usaha mikro yang mengalami perubahan status menjadi kecil | | | 20 UM | 24 | | | 20 UM | 0 | | | |
| | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil | | | 84.251 UM | 84.301 UM | | | 84.251 UM | - | | | |
| | Persentase calon transmigran yang ditempatkan | | | 0% | 100% | | | 0% | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Presentase Pertumbuhan jumlah koperasi baru berbasis agropolitan | | | | | 20% | 40% | | | | | |
| 2 | Persentase Koperasi yang berkualitas | | Persentase koperasi yang berkualitas | | | 70% | 75% | | | | | |
| 3 | Presentase Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan | | | | | 33% | 50% | | | | | |
| 4 | Jumlah Usaha mikro mengalami kenaikan omset | | | | | 75 | 150 | | | | | |
| 5 | Presentase calon transmigran yang berkualitas | | | | | 70% | 75% | | | | | |
| | | | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | | | 100% | 100% | | | | | |

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020, yaitu:

1. Tabel 2.1

Merupakan realisasi atas Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 yang didasarkan pada Renstra 2016-2021. Pada Tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) program dan 2 (dua) program yang realisasinya dibawah target yang telah ditetapkan yaitu: (1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu terealisasi sebesar 71,43% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dan (2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yaitu terealisasi sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan Pandemi Covid-19 sehingga anggaran di *refocusing*.

Sedangkan untuk Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020, Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan, tidak terisi hal ini dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur program/kegiatan. Untuk Tahun 2020 mengacu Renstra Tahun 2016-2021 sedangkan nomenklatur program kegiatan Tahun 2021 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk Tahun 2021 merupakan tahun transisi perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

2. Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 Merupakan realisasi atas Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 yang didasarkan pada Renstra 2016-2021. Pada Tahun 2020 terdapat 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan secara keseluruhan memenuhi target, yaitu pada indikator:

a) Persentase koperasi aktif

Target: 97,80%, realisasi: 96,40% (98,57%)

b) Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi

Target: 88,91%, realisasi: 88,07% (99,06%)

c) Jumlah Usaha Mikro yang mengalami perubahan status menjadi kecil

Target: 20 UM, realisasi 20 UM (100%)

d) Jumlah Usaha Mikro dan Kecil

Target: 84.251 UM, realisasi: 84.251 UM (100%)

e) Persentase calon transmigran yang ditempatkan

Target: 0%, realisasi: 0% (0%)

Target program dan kegiatan Renja Tahun 2021 pada Tabel 2.2 tidak dapat terisi hal ini dikarenakan terdapat perbedaan nomenklatur program/kegiatan, untuk Tahun 2020 mengacu Renstra Tahun 2016-2021 dan Tahun 2021 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi

Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia dan tingkat pendidikan yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi saat ini masih perlu ditingkatkan, Dinas Koperasi dan UM mempunyai permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki *skill* dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
2. Secara internal kendala yang dihadapi adalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur pengelolakegiatan;
3. Kurangnya tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional;
4. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi;
5. Kurangnya inovasi dan kualitas produk KUMKM;
6. Kurangnya permodalan Koperasi dan UMKM;
7. Belum adanya pusat promosi yang khusus menginformasikan secara luas produk unggulan daerah;
8. Rendahnya daya saing produk Usaha Mikro dalam menghadapi dampak global.

Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi mempunyai isu-isu strategis yang dapat dilakukan dalam pembangunan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Ngawi mendatang antara lain sebagai berikut:

1. Kapasitas dan produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro yang masih sangat terbatas.

Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung.

2. Optimalisasi sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Sarana prasarana pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan representasi dari fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro.

3. Kualitas kelembagaan koperasi.
Kelembagaan koperasi yang semakin berkualitas akan meningkatkan produktifitas koperasi tersebut dan secara tidak langsung akan semakin tertata dengan baik.
4. Penguatan kelompok-kelompok strategis sebagai embrio koperasi.
Dalam meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian, maka dilakukan penguatan kapasitas kelompok-kelompok strategis dan potensial untuk diberdayakan menjadi embrio koperasi, diantaranya kelompok pengajian, kelompok masyarakat desa hutan, dan lain-lain.
5. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan Usaha Mikro.
6. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Kesejahteraan pemerataan pertumbuhan; kemiskinan, pengangguran dan kerentanan ekonomi masyarakat desa.
8. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan.
9. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
10. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan usaha mikro yang berkompeten.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi dalam pembinaan Koperasi Usaha Mikro antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, karena beberapa koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik dimana dalam pendiriannya belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota, namun lebih menekankan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi yang menjadi landasan operasionalnya.
- b. Ketertinggalan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro yang disebabkan karena kurangmuya kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran serta rendahnya kompetensi kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro.

- c. Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro yang bermodal kecil yang umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana, dan belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar.
- d. Masih terbatasnya pemasaran produk unggulan usaha mikro ditingkat lokal dan regional, diharapkan dengan fasilitas yang disediakan bisa benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk lebih mempromosikan produknya sehingga bisa lebih dikenal masyarakat luas.

Adapun tantangan dan peluang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu:

1) Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

- Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas untuk ASEAN yaitu AEC (*Asian Economic Community*) tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku.
- Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Adanya dukungan *stakeholder* dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan usaha mikro.

2) Ancaman / Tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD, yaitu:

- Dengan adanya AEC (*Asian Economic Community*) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Mikro baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
- Kurangnya koordinasi antar lembaga / instansi.
- Peraturan yang tidak konsisten.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022. Selanjutnya proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala Daerah.

Program dan kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan awal RKPD merupakan program usulan setelah penyesuaian PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan perlu dilakukan *review* terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Kabupaten Ngawi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Ngawi

| No | Rancangan awal RKPD | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | Cat Ptg |
|----|--|-------------|---|----------------|--|-------------|---|----------------|---------|
| | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
| | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
| | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinkop & UM | Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun | 4 Dokumen | 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinkop & UM | Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun | 4 Dokumen | |
| | | | Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun | 6 Dokumen | | | Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun | 6 Dokumen | |
| | 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinkop & UM | Jumlah Laporan OPD yang disusun | 4 Dokumen | 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinkop & UM | Jumlah Laporan OPD yang disusun | 4 Dokumen | |
| | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |

| | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|
| | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinkop & UM | Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun | 26 Dokumen |
| | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinkop & UM | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun | 6 Dokumen |
| | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% |
| | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Dinkop & UM | Jumlah pakaian batik yang dibeli/diadakan | 45 Set |
| | | | Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan | 138 Meter |
| | | | Jumlah pakaian olahraga yang dibeli/diadakan | 0 Set |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah sosialisasi yang diadakan | 14 kali |
| | Bimtek implementasi perundang undangan | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | 45 orang |
| | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% |
| | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinkop & UM | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan | 100% |
| | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinkop & UM | Persentase pemenuhan kebutuhan ATK | 100% |

| | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|--|
| | 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinkop & UM | Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun | 26 Dokumen | |
| | 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinkop & UM | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun | 6 Dokumen | |
| | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
| | 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Dinkop & UM | Jumlah pakaian batik yang dibeli/diadakan | 45 Set | |
| | | | Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan | 138 Meter | |
| | | | Jumlah pakaian olahraga yang dibeli/diadakan | 0 Set | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah sosialisasi yang diadakan | 14 kali | |
| | Bimtek implementasi perundang undangan | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek | 45 orang | |
| | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
| | 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinkop & UM | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan | 100% | |
| | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinkop & UM | Persentase pemenuhan kebutuhan ATK | 100% | |

| | | | | |
|--|--|----------------|---|--------------|
| | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinkop & UM | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 600 Kotak |
| | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dinkop & UM | Jumlah barang yang dicetak | 70 Buah |
| | | | Jumlah barang yang digandakan | 5.206 Lembar |
| | 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dinkop & UM | Jumlah publikasi ke media cetak dan elektronik | 5 Kali |
| | | | Jumlah surat kabar yang disediakan | 84 Eksemplar |
| | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinkop & UM | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dihadiri/diikuti | 34 Kali |
| | | Luar Kab.Ngawi | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri/diikuti | 155 Kali |
| | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% |
| | 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinkop & UM | Jumlah kendaraan dinas yang dibeli/diadakan | 1 Unit |
| | 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinkop & UM | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli/diadakan | 1 Unit |
| | 3. Pengadaan Mebel | Dinkop & UM | Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan | 1 Set |

| | | | | | |
|--|--|----------------|---|--------------|--|
| | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinkop & UM | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 600 Kotak | |
| | 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Dinkop & UM | Jumlah barang yang dicetak | 70 Buah | |
| | | | Jumlah barang yang digandakan | 5.206 Lembar | |
| | 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dinkop & UM | Jumlah publikasi ke media cetak dan elektronik | 5 Kali | |
| | | | Jumlah surat kabar yang disediakan | 84 Eksemplar | |
| | 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinkop & UM | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dihadiri/diikuti | 34 Kali | |
| | | Luar Kab.Ngawi | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri/diikuti | 155 Kali | |
| | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
| | 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinkop & UM | Jumlah kendaraan dinas yang dibeli/diadakan | 1 Unit | |
| | 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinkop & UM | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli/diadakan | 1 Unit | |
| | 3. Pengadaan Mebel | Dinkop & UM | Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan | 1 Set | |

| Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% |
|---|-------------|---|---------|
| 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinkop & UM | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayar pajak nya | 1 Unit |
| | | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | 1 Unit |
| 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | Dinkop & UM | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajak nya | 2 Unit |
| | | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | 2 Kali |
| 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinkop & UM | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 30 Kali |
| 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dinkop & UM | Jumlah pembayaran jasa keamanan | 24 Kali |
| | | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 207 M2 |
| 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinkop & UM | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 14 unit |
| PROGRAM PELAYANAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM | | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 50 % |

| Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
|---|-------------|---|---------|--|
| 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinkop & UM | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayar pajak nya | 1 Unit | |
| | | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | 1 Unit | |
| 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | Dinkop & UM | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajak nya | 2 Unit | |
| | | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | 2 Kali | |
| 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinkop & UM | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 30 Kali | |
| 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dinkop & UM | Jumlah pembayaran jasa keamanan | 24 Kali | |
| | | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 207 M2 | |
| 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinkop & UM | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 14 unit | |
| PROGRAM PELAYANAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM | | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 50 % | |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| | Kegiatan:Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota | | Presentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 72% |
| | Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | | Jumlah koperasi simpan pinjam yang mengajukan permohonan rekomendasi perijinan | 5 koperasi |
| | Kegiatan: Penerbitan ijin pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | | Presentase fasilitasi penerbitan sertifikat nomor induk koperasi(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota | 100 % |
| | Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | | Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan rekomendasi perijinan pembukaan kantor cabang | 1 koperasi |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--|
| | Kegiatan:Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota | | Presentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 72% | |
| | Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | | Jumlah koperasi simpan pinjam yang mengajukan permohonan rekomendasi perijinan | 5 koperasi | |
| | Kegiatan: Penerbitan ijin pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | | Presentase fasilitasi penerbitan sertifikat nomor induk koperasi(NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota | 100 % | |
| | Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang , cabang pembantu dan kantor kas koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | | Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan rekomendasi perijinan pembukaan kantor cabang | 1 koperasi | |

| | | | | |
|---|---|-------------|--|--------------|
| 2 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 100 % |
| | Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah koperasi yang patuh terhadap perundang-undangan | 325 Koperasi |
| | 1. Pengawasan kekuatan ,kesehatan,kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah koperasi yang diawasi | 0 koperasi |
| | 2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinkop & UM | Jumlah penyuluhan dan konsultasi | 30 Kali |
| | | | Jumlah Kegiatan Pelatihan | 3 kegiatan |
| | | | Jumlah Dokumen | 20 dokumen |
| | | | Jumlah Pelaksanaan pembinaan koperasi | 55 kegiatan |
| | | | Jumlah input data koperasi yang RAT Sistem NIK | 75 dokumen |

| | | | | | |
|--|---|-------------|--|--------------|--|
| | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 100 % | |
| | Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah koperasi yang patuh terhadap perundang-undangan | 325 Koperasi | |
| | 1. Pengawasan kekuatan ,kesehatan,kemandirian,ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah koperasi yang diawasi | 400 koperasi | |
| | 2. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinkop & UM | Jumlah penyuluhan dan konsultasi | 30 Kali | |
| | | | Jumlah Kegiatan Pelatihan | 3 kegiatan | |
| | | | Jumlah Dokumen | 20 dokumen | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan pembinaan koperasi | 55 kegiatan | |
| | | | Jumlah input data koperasi yang RAT Sistem NIK | 75 dokumen | |

| | | | | |
|---|---|------------|--|--------------|
| | | | Jumlah pembinaan dan pengawasan | 12 kali |
| 3 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | Persentase ksp/usp yang naik klasifikasi (dalam pengawasan, khusus dalam pengawasan cukup sehat dan sehat | 100 % |
| | Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah peserta pelatihan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi | 200 Orang |
| | | | Jumlah peserta pelatihan pengembangan sumber daya KSP/USP Koperasi | 250 Orang |
| | | | Jumlah peserta sosialisasi akses pembiayaan bagi usaha mikro | 230 Orang |
| | 1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Ngawi | Jumlah peserta pelatihan yang mendapat nilai 75 | 3 Dokumen |
| | | | Jumlah peserta yang menindaklanjuti hasil sosialisasi | 440 Orang |
| | | | Jumlah peserta yang menindaklanjuti hasil sosialisasi | 460 Orang |

| | | | | |
|--|---|------------|--|--------------|
| | | | Jumlah pembinaan dan pengawasan | 12 kali |
| | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | Persentase ksp/usp yang naik klasifikasi (dalam pengawasan, khusus dalam pengawasan cukup sehat dan sehat | 100 % |
| | Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah peserta pelatihan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi | 200 Orang |
| | | | Jumlah peserta pelatihan pengembangan sumber daya KSP/USP Koperasi | 250 Orang |
| | | | Jumlah peserta sosialisasi akses pembiayaan bagi usaha mikro | 230 Orang |
| | 1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Ngawi | Jumlah peserta pelatihan yang mendapat nilai 75 | 3 Dokumen |
| | | | Jumlah peserta yang menindaklanjuti hasil sosialisasi | 440 Orang |
| | | | Jumlah peserta yang menindaklanjuti hasil sosialisasi | 460 Orang |

| | | | | |
|---|--|------------|--|---------------|
| | 2. Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah even penghargaan kesehatan perkoperasian yang diadakan | 1 even |
| 4 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 100% |
| | Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi | 240 orang |
| | 1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kab. Ngawi | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan | 240 Orang |
| | Kegiatan : Pendidikan dan latihan ukm bagi ukm dalam daerah kabupaten/kota | | Presentase ukm yang menindaklanjuti pendidikan dan latihan | |
| | Peningkatan pemahaman dan pengetahuan ukm serta kapasitas dan kompetensi sdm ukm | | Jumlah peserta pelatihan | |
| 5 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | Jumlah even pameran yang diikuti | 1 |
| | Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah even pameran yang diikuti | 4 Kali |

| | | | | |
|--|--|------------|--|---------------|
| | 2. Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota | | Jumlah even penghargaan kesehatan perkoperasian yang diadakan | 1 even |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 100% |
| | Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi | 240 orang |
| | 1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kab. Ngawi | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan | 240 Orang |
| | Kegiatan : Pendidikan dan latihan ukm bagi ukm dalam daerah kabupaten/kota | | Presentase ukm yang menindaklanjuti pendidikan dan latihan | 30 % |
| | Peningkatan pemahaman dan pengetahuan ukm serta kapasitas dan kompetensi sdm ukm | | Jumlah peserta pelatihan | 200 orang |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | Jumlah even pameran yang diikuti | 1 |
| | Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah even pameran yang diikuti | 4 Kali |

| | | | | |
|---|--|---------------------------|---|---------------|
| | 1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah , Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dalam dan Luar Kab. Ngawi | Jumlah even pameran yang diikuti | 4 Kali |
| | | | Jumlah peserta pelatihan | 360 Orang |
| 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | Persentase usaha mikro kecil yang diberdayakan | 100% |
| | Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | Persentase usaha mikro kecil yang diberdayakan | 100% |
| | 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kab.Ngawi | Jumlah dokumen pemetaan usaha mikro | 1 Dokumen |
| | | | Jumlah peserta yg mendapat nilai 75 | 150 Orang |
| | 2. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraannya | 8 Usaha Mikro |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|---|---------------|
| | 1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah , Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dalam dan Luar Kab. Ngawi | Jumlah even pameran yang diikuti | 4 Kali |
| | | | Jumlah peserta pelatihan | 360 Orang |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | Persentase usaha mikro kecil yang diberdayakan | 100% |
| | Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | Persentase usaha mikro kecil yang diberdayakan | 100% |
| | 1. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kab.Ngawi | Jumlah dokumen pemetaan usaha mikro | 1 Dokumen |
| | | | Jumlah peserta yg mendapat nilai 75 | 150 Orang |
| | 2. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraannya | 8 Usaha Mikro |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--|----------------|
| | 3. Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro | | Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitas perijinan | 10 UM |
| | 4. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Dalam dan Luar Kab.Ngawi | Jumlah usaha mikro yang jejaring pasarnya ditindaklanjuti | 10 Usaha Mikro |
| | 5. Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam [pemberdayaan usaha mikro | | Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti hasil sosialisasi pembiayaan | 30 UM |
| 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omset dan aset | 72 UM |
| | Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | Jumlah usaha mikro makanan yang mengalami perkembangan produk | 35 UM |
| | | | Jumlah usaha mikro non makanan yang mengalami perkembangan produk | 12 UM |
| | | | Jumlah usaha mikro yang melakukan pengembangan desain dan teknologi | 25 UM |
| | 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kab.Ngawi | Jumlah usaha mikro makanan yang menindaklanjuti pelatihan | 35 UM |
| | | | Jumlah usaha mikro non makanan yang menindaklanjuti pelatihan | 12 UM |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|--|----------------|
| | | | | |
| | 3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Dalam dan Luar Kab.Ngawi | Jumlah usaha mikro yang jejaring pasarnya ditindaklanjuti | 10 Usaha Mikro |
| | 5. Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam [pemberdayaan usaha mikro | | Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti hasil sosialisasi pembiayaan | 30 UM |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omset dan aset | 72 UM |
| | Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | Jumlah usaha mikro makanan yang mengalami perkembangan produk | 35 UM |
| | | | Jumlah usaha mikro non makanan yang mengalami perkembangan produk | 12 UM |
| | | | Jumlah usaha mikro yang melakukan pengembangan desain dan teknologi | 25 UM |
| | 1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kab.Ngawi | Jumlah usaha mikro makanan yang menindaklanjuti pelatihan | 35 UM |
| | | | Jumlah usaha mikro non makanan yang menindaklanjuti pelatihan | 12 UM |

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|-----------|
| | | | Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti sosialisasi | 25 UM |
| 8 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | Presentase calon transmigran yang memenuhi persyaratan | 100% |
| | Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah kerjasama antar daerah yang disepakati | 1 KSAD |
| | | | Jumlah transmigran yang ditempatkan | 4 KK |
| | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Daerah penempatan transmigrasi | Menyiapkan data administrasi pendaftaran transmigran | 1 dokumen |
| | | | Menyiapkan pelaksanaan penjajakan, monitoring dan pengawalan ketransmigrasian | 1 lokasi |
| | 2. Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Daerah penempatan transmigrasi | Jumlah transmigran yang ditempatkan | 10 KK |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|-----------|
| | | | Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti sosialisasi | 25 UM |
| | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | Presentase calon transmigran yang memenuhi persyaratan | 100% |
| | Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah kerjasama antar daerah yang disepakati | 1 KSAD |
| | | | Jumlah transmigran yang ditempatkan | 4 KK |
| | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Daerah penempatan transmigrasi | Menyiapkan data administrasi pendaftaran transmigran | 1 dokumen |
| | | | Menyiapkan pelaksanaan penjajakan, monitoring dan pengawalan ketransmigrasian | 1 lokasi |
| | 2. Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Daerah penempatan transmigrasi | Jumlah transmigran yang ditempatkan | 10 KK |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2022

Proses perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menjadi ritme strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan daerah.

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berasal dari internal faktor yaitu:

1. Masalah yang dihadapi dalam penanganan infrastruktur meliputi masalah pada sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut, telekomunikasi, ketenagalistrikan, energi, sumber daya air, perumahan, irigasi, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan serta fasilitas infrastruktur penunjang pariwisata;
2. Pembangunan Manusia, yang berorientasi pada peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta semangat bela Negara;
3. Pembangunan Sektor Unggulan, yang berorientasi pada upaya mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenaga listrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
4. Pemerataan Pembangunan Antarwilayah, berorientasi pada peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah.
5. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Ngawi yang akan mengancam kelestarian ekosistem, keadaan ini akan sangatmemperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu menjamin kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan akibat aktivitas pertambangan rakyat dan perusahaan.

6. Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai akhir 2015 akan berdampak pada penambahan jumlah lapangan kerja di daerah sehingga penyerapan tenaga kerja akan terbuka lebar dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam.
7. Fluktuasi harga minyak mentah dunia menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai harga keekonomiannya sehingga hal tersebut akan memicu meningkatnya inflasi. Mengingat peranan BBM sebagai komoditi pokok, sehingga kenaikan sedikit saja akan membawa “efek domino” ke sektor-sektor lain terutama industri dan transportasi yang selanjutnya akan mempengaruhi harga barang dan jasa. Selain dari komponen administered prices tersebut, resiko meningkatnya inflasi pada tahun 2015 juga masih berasal dari volatile food yang terjadi sebagai akibat faktor cuaca maupun penurunan produksi.
8. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pemerintahan (tata kelola pemerintahan) yang berbasis kinerja serta belum optimalnya profesionalisme aparatur dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.

Keberhasilan dalam melakukan pembangunan tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan daerah dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan serta kewenangan yang cukup dalam program pembangunan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Sehubungan dengan itu, untuk penyempurnaan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2021 terdapat beberapa inovasi perencanaan kedepan yaitu: (a) Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK yang konsisten dalam penganggaran dan pelaksanaannya, (b) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, (c) Dinas Koperasi dan UM Kab. Ngawi sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel, (d) Kemampuan dalam menghadapi multi dimensi kedepan dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan, (e) Pemantapan komunikasi publik dan Stakeholders tentang produk-produk perencanaan dan hasil-hasil

kajian stratejik pembangunan, (f) Pemantapan peran Dinas Koperasi dan UM selaku Motivator, Koordinator, Administrator serta Agen Perubahan dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan telah dilaksanakan dengan baik pada masing-masing wilayah kecamatan. Dalam urusan bidang koperasi dan usaha mikro, Kecil dan menengah, jumlah usulan dari Kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan Anggaran.

Beberapa usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari usulan Dewan maupun Masyarakat yang belum dapat diakomodir karena terbatas dengan peraturan permendagri no 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial Yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah namun untuk merespon kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maka di berikan kegiatan yang dapat membina dan memberdayakan masyarakat yaitu pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis peningkatan ketrampilan.

Diakui pula sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas yang didasarkan atas kajian yang komprehensif selain itu juga untuk membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di Kabupaten Ngawi khususnya urusan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah maka, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi sangat dibutuhkan sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

TABEL 2.5
Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022
Kabupaten Ngawi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi

| Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Besaran/ volume | Catatan |
|------|----|----|------|----|--|-------------|--|-----------------|---------|
| 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dinkop & UM | Jumlah dokumen penganggaran OPD yang disusun | 4 Dokumen | |
| | | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun | 6 Dokumen | |
| 2 | 17 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinkop & UM | Jumlah Laporan OPD yang disusun | 4 Dokumen | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dinkop & UM | Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN yang disusun | 26 Dokumen | |
| 2 | 17 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dinkop & UM | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun | 6 Dokumen | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
| 2 | 17 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Dinkop & UM | Jumlah pakaian batik yang dibeli/diadakan | 47 Set | |
| | | | | | | | Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan | 138 Meter | |
| | | | | | | | Jumlah pakaian olahraga yang dibeli/diadakan | 0 Set | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|----------------|---|----------------------|--|
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dinkop & UM | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan | 100% | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinkop & UM | Persentase pemenuhan kebutuhan ATK | 100% | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Dinkop & UM | Jumlah Makanan dan minuman yang disediakan | 600 Kotak | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dinkop & UM | Jumlah barang yang dicetak | 71 Buah | |
| | | | | | | | Jumlah barang yang digandakan | 5.206 Lembar | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Dinkop & UM | Jumlah publikasi ke media cetak dan elektronik | 5 Kali | |
| | | | | | | | Jumlah surat kabar yang disediakan | 84 Eksemplar | |
| 2 | 17 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinkop & UM | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dihadiri/diikuti | 34 Kali | |
| | | | | | | Luar Kab.Ngawi | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri/diikuti | 155 Kali | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinkop & UM | Jumlah kendaraan dinas yang dibeli/diadakan | 1 Unit | |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dinkop & UM | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli/diadakan | 1 Unit | |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Dinkop & UM | Jumlah meubelair yang dibeli/diadakan | 5 Unit | |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinkop & UM | Jumlah peralatan kantor yang dibeli/diadakan | 13 Unit | |
| 2 | 17 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinkop & UM | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 10 Unit | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dinkop & UM | Jumlah rekening air yang dibayar | 12 Rekening Air | |
| | | | | | | | Jumlah rekening internet yang dibayar | 24 Rekening internet | |
| | | | | | | | Jumlah rekening listrik yang dibayar | 24 Rekening Listrik | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|-------------|--|---------------------|--|
| | | | | | | | Jumlah rekening telepon yang dibayar | 12 Rekening Telepon | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Dinkop & UM | Jumlah Alat kebersihan yang dibeli | 6 Jenis | |
| | | | | | | | Jumlah Bahan kebersihan yang dibeli | 10 Jenis | |
| | | | | | | | Jumlah pembayaran jasa kebersihan | 12 Kali | |
| 2 | 17 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Dinkop & UM | Jumlah materai yang terbeli | 2000 Lembar | |
| | | | | | | | Jumlah pembayaran honor | 98 Kali | |
| | | | | | | | Jumlah pembayaran lembur | 64 Kali | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun | 100% | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinkop & UM | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayar pajak nya | 1 Unit | |
| | | | | | | | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara | 1 Unit | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | Dinkop & UM | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajak nya | 2 Unit | |
| | | | | | | | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas | 2 Kali | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dinkop & UM | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 30 Kali | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Dinkop & UM | Jumlah pembayaran jasa keamanan | 24 Kali | |
| | | | | | | | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 207 M2 | |
| 2 | 17 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Dinkop & UM | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 14 unit | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa | 100 % | |
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | | Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa | 100 % | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|-------------|--|---------------|--|
| 2 | 17 | 03 | 2.01 | 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinkop & UM | Jumlah koperasi yang patuh terhadap perundang-undangan | 252 Koperasi | |
| 2 | 17 | 04 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | Persentase ksp/usp yang naik klasifikasi (dalam pengawasan, khusus dalam pengawasan cukup sehat dan sehat | 100 % | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | | Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase ksp/usp yang naik klasifikasi (dalam pengawasan, khusus dalam pengawasan cukup sehat dan sehat | 100 % | |
| 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab. Ngawi | Jumlah laporan penilaian kesehatan KSP/USP | 3 Dokumen | |
| | | | | | Jumlah peserta pelatihan yang mendapat nilai 75 | | 440 Orang | | |
| | | | | | Jumlah peserta yang menindaklanjuti hasil sosialisasi | | 460 Orang | | |
| 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian | 100% | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | | Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian | 100% | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Kab. Ngawi | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi | 510 Orang | |
| 2 | 17 | 06 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | Jumlah even yang diikuti untuk peningkatan akses pasar | 1 Kali | |
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | | Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah even yang diikuti untuk peningkatan akses pasar | 1 Kali | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---------------------------|--|----------------|--|
| 2 | 17 | 06 | 2.01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah , Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Dalam dan Luar Kab. Ngawi | Jumlah even yang diikuti | 1 Kali | |
| 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | Persentase usaha mikro kecil yang diberdayakan | 100% | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | | Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | Persentase usaha mikro kecil yang diberdayakan | 100% | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Kab.Ngawi | Jumlah dokumen pemetaan usaha mikro | 1 Dokumen | |
| | | | | | | | Jumlah peserta yg mendapat nilai 75 | 150 Orang | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraannya | 8 Usaha Mikro | |
| 2 | 17 | 07 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Dalam dan Luar Kab.Ngawi | Jumlah usaha mikro yang jejaring pasarnya ditindaklanjuti | 10 Usaha Mikro | |
| 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omset dan aset | 4 UM | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | | Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omset dan aset setiap tahunnya | 4 UM | |
| 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Kab.Ngawi | Persentase peserta pelatihan diversifikasi produk makanan yang menindaklanjuti hasil pelatihan | 25% | |
| | | | | | | | Persentase peserta pelatihan diversifikasi produk non makanan yg menindaklanjuti hasil pelatihan | 25% | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--------------------------------|--|-------------|--|
| | | | | | | | Persentase peserta sosialisasi pengembangan teknologi yang menindaklanjuti hasil sosialisasi | 25% | |
| 3 | 32 | 03 | | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan | 100% | |
| 3 | 32 | 03 | 2.01 | | Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase calon transmigrasi yang memenuhi persyaratan | 100% | |
| 3 | 32 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Daerah penempatan transmigrasi | Jumlah kerjasama antar daerah yang disepakati | 3 KSAD | |
| 3 | 32 | 03 | 2.01 | 04 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Daerah penempatan transmigrasi | Jumlah calon transmigran yang difasilitasi | 10 KK | |

Adapun usulan kecamatan yaitu sebagai berikut:

USULAN KECAMATAN

| Tgl Usul | Pengusul | Profil | Urusan | Usulan | Permasalahan | Alamat | OPD Tujuan | Rekomendasi Mitra Bappeda | Kategori Usulan | Koef. | Rekomendasi Kelurahan/Desa | Rekomendasi Kecamatan |
|------------|-----------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|-----------------|-------|--|---|
| 20-01-2021 | SUKOCO | Kepala Desa Kasreman | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Batik | Tidak ada pelatih | Dusun Karangrejo Desa Kasreman, Kab. Ngawi, Geneng, Kasreman | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan RKPd dan Prioritas Koefisien : 130 orang Anggaran : 65100000 | renja | 0 | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sesuai dengan rancangan RKPd dan Prioritas Koefisien : 130 orang Anggaran : 65100000 |
| 22-01-2021 | SUWARJONO | Kepala Desa Kartoharjo | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Aneka Olahan Toga | Pelatihan sangat dibutuhkan karena sesuai dengan potensi desa. Adanya toga belum dimanfaatkan secara maksimal. | Desa Kartoharjo, Kab. Ngawi, Ngawi, Kartoharjo | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan awal RKPd dan prioritas Koefisien : 20 OH Anggaran : 7200000 | renja | 0 | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan awal RKPd dan prioritas Koefisien : 20 OH Anggaran : 7200000 |
| 22-01-2021 | SUWARJONO | Kepala Desa Kartoharjo | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Kerajinan Pelepeh Pisang | Pelatihan sangat dibutuhkan karena sesuai dengan potensi desa. Banyak warga yang mempunyai tanaman pisang tetapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. | Desa Kartoharjo, Kab. Ngawi, Ngawi, Kartoharjo | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan RKPd dan Prioritas Koefisien : 24 OH Anggaran : 17100000 | renja | 0 | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan RKPd dan prioritas Koefisien : 24 OH Anggaran : 17100000 |
| 22-01-2021 | SUWARJONO | Kepala Desa Kartoharjo | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Aneka Olahan Keripik | Pelatihan sangat dibutuhkan karena sesuai dengan potensi desa dan untuk meningkatkan ekonomi warga desa. Banyak warga yang menginginkan pelatihan olahan keripik pisang, keripik ketela dan pemasarannya. | Desa Kartoharjo, Kab. Ngawi, Ngawi, Kartoharjo | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan awal RKPd dan Prioritas Koefisien : 44 OH Anggaran : 15600000 | renja | 0 | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan awal RKPd dan prioritas Koefisien : 44 OH Anggaran : 15600000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-------|---|--------------------------------------|--|
| 22-01-2021 | Dra. KUNBDARI, M.Ag | Kepala Desa Banyubiru | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Handycraft Kain | Pembekalan Masyarakat Desa Banyubiru tentang membuat kerajinan handycraft kain | Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, Kab. Ngawi, Widodaren, Banyubiru | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan RKPD dan prioritas Koefisien : 45 orang Anggaran : 22500000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sudah sesuai hasil musrenbangcam Koefisien : 45 orang Anggaran : 22500000 |
| 22-01-2021 | SUDARMANT O | Kepala Desa Kauman | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Aneka Olahan Keripik | tersedianya bahan baku dan menambah pegalaman | dusun kauman rt 03 rw 04 desa kauman, Kab. Ngawi, Widodaren, Kauman | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sdh sesuai dengan rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 30 orang Anggaran : 10500000 | renja | 0 | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sudah sesuai hasil musrenbangcam Koefisien : 30 orang Anggaran : 10500000 |
| 22-01-2021 | MOKHAMAD SUHADI | Kepala Desa Tambakromo | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Aneka Makanan Olahan | ibu rumah tangga di desa mempunyai bakat memasak tetapi kurang bisa berkreasikan dan berinovasi dengan makanan yang diolah tersebut | Dsn Tambakromo 1,2,3,4,5, Kab. Ngawi, Geneng, Tambakromo | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 50 orang Anggaran : 13250000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 50 orang Anggaran : 13250000 |
| 22-01-2021 | NASIR | Kepala Desa Kwadungan Lor | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Aneka Olahan Kue | Semakin banyaknya kebutuhan Snak di desa, tp pengusaha kue masih belum ada di karenakan kurangnya SDm dalam pembuatan Kue | Desa Kwadungan lor, Kab. Ngawi, Padas, Kwadungan Lor | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 50 orang Anggaran : 17500000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sesuai hasil musrenbangcam Koefisien : 50 orang Anggaran : 17500000 |
| 22-01-2021 | SURATNO | Kepala Desa Klampisan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Aneka Olahan Kue | Agar para ibu rumah tangga dapat mempunyai kompetensi untuk membuat aneka olahan kue yang dapat di distribusikan ke Pasar PON Desa Klampisan | Desa Klampisan, Kab. Ngawi, Geneng, Klampisan | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : sudah sesuai dengan Rancangan RKPD dan Prioritas Koefisien : 71 orang Anggaran : 25000000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sudah sesuai dengan Rancangan RKPD dan Koefisien : 71 orang Anggaran : 25000000 |
| 22-01-2021 | H. BUDI RAHARJO | Kepala Desa Tepas | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Aneka Makanan Olahan | 1. Jenis olahan makanan kurang bervariasi 2. Tidak ada kursus/pelatihan sama sekali. 3. Menurunnya minat wirausaha khususnya di bidang kuliner makanan. | Dsn. Tepas I RT. 02/ RW. 03 (Sekretariat PKK), Kab. Ngawi, Geneng, Tepas | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 68 OH Anggaran : 18100000 | renja | 0 | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 68 OH Anggaran : 18100000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|---|-------|--|--|---|
| 23-01-2021 | SUGENG WIYONO | Kepala Desa Dempel | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Peningkatan SDM Usaha Mikro | Pelaku Usaha Mikro di Desa Dempel perlu mengikuti pelatihan agar memiliki wawasan peningkatan produktifitas dan strategi marketing | Desa Dempel, Kab. Ngawi, Geneng, Dempel | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan Rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 25 OH Anggaran : 37500000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan Rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 25 OH Anggaran : 37500000 |
| 23-01-2021 | SUNARDI S.Pd | Kepala Desa Sidomakmur | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Aneka Olahan Toga | Pengembangan | SIDOMAKMUR KM 01 WIDODAREN NGAWI, Kab. Ngawi, Widodaren, Sidomakmur | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan Rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 53 Orang/Hari Anggaran : 14250000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sesuai hasil musrenbangcam Koefisien : 53 Orang/Hari Anggaran : 14250000 |
| 23-01-2021 | BAMBANG SURYO SAPUTRO,SE, MM | Kepala Desa Karanggupito | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Peningkatan SDM Usaha Mikro | membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan SDM di bidang Usaha Mikro | Ds. Karanguupito, Kec. Kendal, Kab. Ngawi, Kendal, Karanggupito | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan Rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 60 OH Anggaran : 90000000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | |
| 24-01-2021 | WINARNI, S.Pd | Kepala Desa Plosolor | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Daur Ulang Kayu | Banyak tersedia limbah kayu yang belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal | Dusun Selang, Kab. Ngawi, Karangjati, Plosolor | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 10 OH Anggaran : 7000000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sesuai hasil musrenbangcam Koefisien : 10 OH Anggaran : 7000000 |
| 25-01-2021 | TUTIK PURWATI | Kepala Desa Tambakromo | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Olahan Ketela | ibu - ibu kader pkk belum pernah mendapatkan pelatihan | Desa Tambakromo, kec.Padas, Kab. Ngawi, Padas, Tambakromo | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan Rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 20 OH Anggaran : 14000000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sesuai hasil musrenbangcam Koefisien : 20 OH Anggaran : 14000000 |
| 25-01-2021 | PRIYO PRAYITNO | Kepala Desa Gentong | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Sulam Pita | masih banyaknya pemuda desa gentong yang belum memiliki pekerjaan. dan kurangnya ilmu ketrampilan tentang pembuatan kerajinan tas rajut dal lain sebagainya. dengan adanya pelatihan diharapkan mampu merubah perekonomian keluarga. | desa gentong, Kab. Ngawi, Paron, Gentong | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan Rancangan awal dan RKPD dan Prioritas Koefisien : 11 OH Anggaran : 8190000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sesuai musrenbang kecamatan Koefisien : 11 OH Anggaran : 81900000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|---|-------|--|--------------------------------------|---|
| 25-01-2021 | TRI JOKO | Kepala Desa Brubuh | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Aneka Olahan Toga | Banyaknya Tanaman Toga di Desa Brubuh | Kantor Desa Brubuh, Kab. Ngawi, Jogorogo, Brubuh | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah Sesuai dengan Rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 24 OH Anggaran : 8490000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sesuai dengan hasil musrenbangcam Koefisien : 20 OH Anggaran : 7000000 |
| 25-01-2021 | ARIF MUKTI SATYO NUGROHO, S.Psi | Lurah Margomulyo | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Rias | Memberikan ketrampilan merias diri pada warga kelurahan margomulyo khususnya para wanita | Kelurahan Margomulyo, Kab. Ngawi, Ngawi, Margomulyo | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan Rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 17 OH Anggaran : 8625000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : Sudah sesuai rancanagn awal RKPD dan prioritas Koefisien : 17 OH Anggaran : 8625000 |
| 25-01-2021 | IDA DWI RINAWATI | Kepala Desa Legowetan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Batik | Tingkat pengangguran dikalangan Pemuda | Dusun lego RT 03 RW 01 Desa Legowetan, Kab. Ngawi, Bringin, Legowetan | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah Sesuai dengan Rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 15 OH Anggaran : 7500000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : Sesuai Ranwal RKPD Dan Prioritas Koefisien : 15 OH Anggaran : 7500000 |
| 25-01-2021 | SULARSO | Kepala Desa Kletekan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru | Menciptakan Kemandirian Masyarakat dengan berwirausaha | Desa Kletekan, Kab. Ngawi, Jogorogo, Kletekan | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah Sesuai dengan Rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 10 OH Anggaran : 15000000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sesuai dengan hasil musrenbangcam Koefisien : 100 OH Anggaran : 40000000 |
| 26-01-2021 | ROFFIANI DIYAN PUSPITASARI | Lurah Pelem | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Peningkatan SDM Usaha Mikro | kelurahan pelem merupakan daerah home indutri pembuatan kue, olahan makanan dan cemilan kue - kue kering dan banyak dari para pedagang kesulitan dalam memasarkan hasil olahannya ke masyarakatan | Kelurahan Pelem Jl. Munginsidi No. 29 Ngawi, Kab. Ngawi, Ngawi, Pelem | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 50 OH Anggaran : 75000000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : Sudah Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 50 OH Anggaran : 75000000 |
| 26-01-2021 | HARYONO SEPUTRO, ST | Kepala Desa Karangasri | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Handycraft Kain | Perlunya pelatihan yang simultan | Desa Karangasri, Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 10 OH Anggaran : 4500000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 10 OH Anggaran : 4500000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|-------|---|--------------------------------------|--|
| 26-01-2021 | HARYONO SEPUTRO, ST | Kepala Desa Karangasri | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Aneka Olahan Kue | Perlu adanya pelatihan aneka olahan kue | Desa Karangasri, Kab. Ngawi, Ngawi, Karangasri | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan Rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 10 OH Anggaran : 3500000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : Sudah sesuai dengan Rancangan awal RKPD dan Prioritas Koefisien : 10 OH Anggaran : 3500000 |
| 06-02-2021 | SITI YUSMINI, S.Pd | Kepala Desa Babadan | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Aneka Makanan Olahan | Banyak ibu ibu warga desa babadan saat selesai masa tanam dan masa tunggu musim panen menganggur tidak ada kegiatan yg bersifat peningkatan penghasilan | Dusun Nanggalan, dusun brendil, dusun babadan wetan, Kab. Ngawi, Paron, Babadan | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Koefisien : 30 OH Anggaran : 8000000 | renja | 0 | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : sesuai dengan musrenbang kecamatan Koefisien : 30 OH Anggaran : 8000000 |
| 06-02-2021 | EKO SUPRABOWO | Kepala Desa Krompol | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pelatihan Peningkatan SDM Usaha Mikro | untuk manajemen keuangan bagi pelaku usaha | Dusun winong barat , dusun winong timur, dusun krompol 1 , dusun krompol 2, Kab. Ngawi, Bringin, Krompol | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO | Rekomendasi : sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Koefisien : 7 OH Anggaran : 10500000 | renja | | Rekomendasi : Koefisien : Anggaran : | Rekomendasi : Sesuai dengan Ranwal RKPD Koefisien : 7 OH Anggaran : 105000000 |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Untuk menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi Tahun 2022

Tujuan dan sasaran Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi Tahun 2022 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026 dalam rencana program/kegiatan prioritas Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- b. Menjadi Petunjuk Untuk pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi Tahun anggaran 2022.
- c. Menjadi Pedoman dalam pelaksanaan tugas seluruh Bidang dan Sekretriats Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena adanya kebijakan publik.
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi.
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2022 sebanyak 8 Program 15 Kegiatan 34 Sub Kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini:

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi 2022 memiliki peran dalam skema perencanaan pembangunan di Kabupaten Ngawi. Hal ini mengharuskan mampu menganalisa capaian kinerja yang masih belum tercapai sehingga pada Rencana Kerja tahun 2022 Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi dapat difokuskan untuk pencapaian kondisi RPJMD Kabupaten Ngawi 2022-2026.

Perencanaan Program dan Kegiatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya. Untuk memecahkan isu-isu penting terkait tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Program non urusan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi sebanyak 9 Program dengan 42 Sub Kegiatan dan 16 Kegiatan.

Rencana pendanaan Program Kegiatan Tahun 2022 yaitu Rp. 12.519.867.841,- untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp. 6.608.212.841,- .

Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Ngawi dalam jangka 1 tahun telah merencanakan program dan kegiatan prioritas yang dijabarkan dalam bentuk rencana kerja untuk mendukung RPJMD Kabupaten Ngawi dan mencapai target yang diharapkan serta dukungan pendanaan yang di gambarkan pada tabel berikut:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|--|--------------------------------------|--|-------|--|-----------|------------------------------|--|---|-------|
| 2 | 17 | 01 | 2,05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2,05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah pakaian batik yang dibeli/diadakan Jumlah pakaian dinas yang dibeli/diadakan Jumlah pakaian olahraga yang dibeli/diadakan | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 45 Set 135 Meter 45 Set | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah sosialisasi yang diadakan | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Kali | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah peserta yang mengikuti bintek | Presentase koperasi yang berkualitas | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 45 Orang | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah air isi ulang yang disediakan Jumlah makanan yang disediakan Jumlah minuman yang disediakan | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 Galon 600 Kotak 100 Botol/Du | 70 % s | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|---|--------------------------------------|--|-------|------------------------------------|-------------|--|--|--|---|-------|
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah barang yang dicetak Jumlah barang yang digandakan Jumlah iklan/publikasi media cetak | Presentase koperasi yang berkualitas | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 70 Lembar 5206 Lembar 1 Kali | 70 % | | | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah surat kabar yang disediakan | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 3 Buku 120 Eksempl | a 70 % r | | | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dihadiri/diikuti Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri/diikuti | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 34 Kali 155 Kali | 70 % | | | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah kendaraan jabatan yang diadakan | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Unit | 70 % | | | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibeli/diadakan | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Unit | 70 % | | | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 05 | Pengadaan Mebel | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah meubelair yang diadakan | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 5 Unit | 70 % | | | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|--|--------------------------------------|--|-------|---|------|------------------------------|---|-------|
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah peralatan kantor yang diadakan | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 5 Unit | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah perlengkapan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 6 Unit | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah rekening listrik yang dibayar Jumlah rekening telepon yang dibayar | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 12 Rekening Air 24 Rekening Internet 48 Rekening Listrik 12 Rekening Telepon | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah Alat kebersihan yang dibeli Jumlah Bahan kebersihan yang dibeli Jumlah pembayaran jasa keamanan Jumlah pembayaran jasa kebersihan Jumlah pembayaran jasa operator | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 6 Jenis 10 Jenis 24 Kali 24 Kali 12 Kali | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DalamSetahun | Jumlah pembayaran honor Jumlah pembayaran lembur | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 92 Kali 84 Kali | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |

| 2 | 17 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|--------------------------------------|--|-------|--------------------|------|------------------------------|--|---|-------|
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | Jumlah kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Unit 1 Unit | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 2 Unit 2 Kali | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | Jumlah pemeliharaan peralatan kerja | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 28 Kali | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | Jumlah pembayaran jasa keamanan Luasan gedung kantor yang dipelihara | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 24 Kali 1 Paket | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |
| 2 | 17 | 01 | 2,09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 14 Unit | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Prosentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Setahun | 100 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|--|---|--|------|--------------|------|------------------------------|--|------|
| 2 | 17 | 02 | | | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 02 | 2,01 | | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 02 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk kopersi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Jumlah koperasi simpan pinjam yang mengajukan permohonan rekomendasi perijinan | Persentase pertumbuhan jumlah koperasi baru terutama berbasis agropolitan | | 50 % | 5 Koperasi | 20 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk kopersi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 50 % |
| 2 | 17 | 02 | 2,02 | | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 02 | 2,02 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk kopersi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan rekomendasi perijinan pembukaan kantor cabang | Persentase pertumbuhan jumlah koperasi baru terutama berbasis agropolitan | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50 % | 1 Koperasi | 20 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk kopersi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 50 % |
| 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | 2,01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 03 | 2,01 | 01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Presentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten ngawi | Jumlah koperasi yang diawasi | Presentase koperasi yang berkualitas | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75 % | 400 Koperasi | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Presentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten | 75 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|---|--|---|---|--------------------------------------|--|------------|---|------|------------------------------|---|------------|
| 2 | 17 | 03 | 2,01 | 02 | Pemeriksaan Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Prosentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten ngawi | Jumlah dokumen Jumlah input data koperasi yang RAT Sistem NIK Jumlah kegiatan pelatihan Jumlah koperasi yang diperiksa Jumlah pelaksanaan pembinaan koperasi Jumlah pembinaan dan pengawasan Jumlah penyuluhan dan konsultasi | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75 % | 20 Dokumen 75 Dokumen 3 Kegiatan 400 Koperasi 55 Kegiatan 12 Kali 30 Kali | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Prosentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten ngawi | 75 % |
| 2 | 17 | 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 04 | 2,01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 04 | 2,01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi | Jumlah Penilaian Kesehatan yang dilaksanakan | Prosentase Koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53 ksp/usp | 1 Kali | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi | 53 ksp/usp |
| 2 | 17 | 04 | 2,01 | 02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan | Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi | Jumlah even penghargaan kesehatan perkoperasian yang diadakan | Prosentase Koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53 ksp/usp | 1 even | 70 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah KSP/USP yang naik klasifikasi | 53 ksp/usp |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|--|--|--|--|--------------------------------------|--|------|----------------------------------|------|------------------------------|--|------------|
| 2 | 17 | 05 | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | Pendidikan dan Latihan Perko perasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perko perasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Pro sentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten /kota | Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perko perasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perko perasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50 % | 1200 Orang 1% 20 % 62 % | 70 % | PENDAP ATAN ASLIDAERAH (PAD) | Pro sentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten /kota | 50 % |
| 2 | 17 | 05 | 2.02 | Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 05 | 2.02 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM | Pro sentase koperasi yg mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah peserta pelatihan | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 200 orang | 70 % | PENDAP ATAN ASLIDAERAH (PAD) | Pro sentase koperasi yg mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 100 persen |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|---|--------------------------------------|--|-------|--|------|--|--|------------------------------|--|-------|
| 2 | 17 | 06 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 06 | 2,01 | | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 06 | 2,01 | 01 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelenbagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Prosentase Koperasi yang di berikan Dukungan Fasilitas Pemasaran | Jumlah even perkoperasian yang diikuti Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi | Presentase koperasi yang berkualitas | Kab. Ngawi, Senua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7,5 % | 4 Kali 1.5 % 3 % 1.5 Persen 65 % | 70 % | | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Prosentase Koperasi yang di berikan Dukungan Fasilitas Pemasaran | 7,5 % |

| PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|------|----|---|---|--|--|--|----------------|---|------|------------------------------|---|----------------|
| Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 07 | 2,01 | 01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Presentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Prosentase usuha mikro yang aktif pada tahun berkenaan | Jumlah dokumen penetaan usaha mikro Jumlah peserta pelatihan yang mendapat nilai 75 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem online data sistem (ODS) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro | Presentase Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan | Kab. Ngawi, Senua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 1 Dokumen 150 Orang 55.3 % 9.4 % | 20 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Presentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Prosentase usuha mikro yang aktif pada tahun berkenaan | 100 % 100 % |
| 2 | 17 | 07 | 2,01 | 02 | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Presentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Prosentase usuha mikro yang aktif pada tahun berkenaan | Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraannya Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra | Presentase Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan | Kab. Ngawi, Senua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 7 UM 1.1 % | 20 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Presentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Prosentase usuha mikro yang aktif pada tahun berkenaan | 100 % 100 % |
| 2 | 17 | 07 | 2,01 | 03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Presentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Prosentase usuha mikro yang aktif pada tahun berkenaan | Jumlah Usaha mikro yang mendapat fasilitas perijinan | Presentase Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan | Kab. Ngawi, Senua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 10 UM | 20 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Presentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Prosentase usuha mikro yang aktif pada tahun berkenaan | 100 % 100 % |
| 2 | 17 | 07 | 2,01 | 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Presentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Prosentase usuha mikro yang aktif pada tahun berkenaan | Jumlah usaha mikro yang jejaring pasarnya ditindaklanjuti | Presentase Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan | Kab. Ngawi, Senua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 8 UM | 20 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Presentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Prosentase usuha mikro yang aktif pada tahun berkenaan | 100 % 100 % |
| 2 | 17 | 07 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Presentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Prosentase usuha mikro yang aktif pada tahun berkenaan | Jumlah UM yang menindaklanjuti hasil sosialisasi pembiayaan | Presentase Pertumbuhan jumlah wirausaha baru terutama berbasis agropolitan | Kab. Ngawi, Senua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % 100 % | 90 UM | 20 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Presentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Prosentase usuha mikro yang aktif pada tahun berkenaan | 100 % 100 % |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|---|---|---|--|--|-------|-------------------------|--------|------------------------------|---|-------|
| 2 | 17 | 08 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 08 | 2,01 | | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 08 | 2,01 | 01 | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omset | Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi penasararan Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti hasil pelatihan Jumlah usaha mikro yang menindaklanjuti sosialisasi | Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omset | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75 um | 10 UM 47 UM 25 UM | 75 UJM | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Jumlah usaha mikro yang mengalami kenaikan omset | 75 um |
| 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | |
| 3 | 32 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | |
| 3 | 32 | 03 | | | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | | | | | | |
| 3 | 32 | 03 | 2,01 | | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| 3 | 32 | 03 | 2,01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Calon Transmigrasi yang memenuhi persyaratan | Jumlah data administrasi pendaftaran transmigran Jumlah pelaksanaan peninjauan, monitoring dan pengawalan ketransmigrasian | Presentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 1 Dokumen 1 Lokasi | 78 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Prosentase Calon Transmigrasi yang memenuhi persyaratan | 100 % |
| 3 | 32 | 03 | 2,01 | 04 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Calon Transmigrasi yang memenuhi persyaratan | Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya Jumlah transmigran yang diberikan pembekalan seleksi dan | Presentase transmigran yang bertahan dilokasi transmigrasi | Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 0 Kawasan 14 KK | 78 % | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Prosentase Calon Transmigrasi yang memenuhi persyaratan | 100 % |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi merupakan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi Tahun 2022 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi serta mengacu pada rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022. Rencana Kerja ini sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022, diharapkan manfaat pelaksanaan kegiatan dapat membantu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro Kabupaten Ngawi, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi serta sebagai penunjang pembangunan daerah.

BUPATI NGAWI,


ONY ANWAR HARSONO